

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perempuan menjadi tumpuan bagi pembangunan bangsa ini. Pahlawan yang membela Indonesia pada masa penjajahan walaupun sebagian besar terdapat kaum laki-laki akan tetapi perempuan juga berperan dalam masa kemerdekaan. Peran perempuan sebagai pahlawan perempuan pembela tanah air pun tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya dalam hal ini perempuan dapat menjadi aktor pembawa kelangsungan pembangunan bangsa. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mukmin, (1980: 78) yaitu:

“Sejak awal abad ke-19, beberapa wanita Indonesia telah tampil dipanggung sejarah secara perorangan dalam membela tanah air dan bangsanya, misalnya Nyi Ageng Serang, Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, Dewi Sartik, Maria Walanda Maramis, Nyai Ahmad Dahlan. Masa yang amat penting dan itu menjadi titik balik dari perjuangan gerakan perempuan adalah pada tahun 1928, saat dimana diadakan Kongres Perempuan yang pertama di Yogyakarta”

Kelebihan-kelebihan perempuan juga tercakup dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peran perempuan juga semakin meningkat baik dalam ranah publik maupun domestik. Peran perempuan dalam ranah domestik yang maksudnya adalah ruang lingkup kegiatan perempuan yang berhubungan dengan kegiatan di rumah dan kodratnya sebagai seorang perempuan, misalnya menjadi ibu

yang bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak dan urusan rumah tangga lainnya, seperti membersihkan rumah, dan juga memasak. Akan tetapi kelebihan yang dimiliki oleh perempuan juga terlihat dalam ranah publik seperti halnya pada saat ini banyaknya pejabat publik perempuan dan juga tidak sedikit perempuan yang menduduki jabatan yang tinggi seperti salah satunya ibu Tri Rismaharini yang menjabat sebagai menteri sosial dengan ketegasan dan juga keberaniannya dapat mempengaruhi peningkatan pembangunan di Indonesia dalam bidang sosial. Artinya dalam hal ini tidak dapat disamaratakan bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Meskipun masih banyak sebagian besar yang meragukan kedudukan serta peran perempuan, hal ini diperkuat oleh pendapat Hadriana Marhaeni Munthe (2003: 10). Yang menyatakan bahwa.

“Secara biologis wanita dan pria memang tidak sama, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang dilengkapi dengan akal dan budi dan kehendak merdeka, kedua macam insan itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Namun dalam kenyataannya, baik dinegara maju maupun di negara berkembang, wanita dianggap sebagai warga negara kelas dua, yang selalu mengalami kesulitan untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya”.

Kelemahan atau kekurangan peran perempuan dalam berbagai sektor tersebut diperlukan pemberdayaan atau penguatan berbagai macam program penguatan atau pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini Pemberdayaan perempuan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena hal tersebut merupakan suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan Shardlo

(1998: 32) yang menyatakan bahwa. “Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”

Perlu diketahui dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di setiap masing-masing daerah masih diperlukan seperti halnya dengan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan serta evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

Dalam hal ini Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) kota Batu sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota batu yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Wali Kota Batu No.72 tahun 2016 menyatakan bahwa:

“pemberdayaan perempuan memiliki tugas untuk menyiapkan bahan kegiatan penguatan dan pengembangan perempuan baik di bidang politik, hukum, sosial dan juga ekonomi pada organisasi kemasyarakatan sehingga bahan untuk kegiatan tersebut yaitu berupa pembinaan dan jejaring pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam rangka peningkatan kualitas perempuan”.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan di Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) kota Batu. Sebagaimana penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada ibu Yeni selaku Kepala seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Penggalan data dilakukan di kantor Dinas pemberdayaan

perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Batu pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.30. bahwasanya dalam wawancara tersebut beliau memberikan pernyataan sebagaimana berikut.

“Dalam upaya pemberdayaan perempuan di kota Batu dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) dengan memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah daerah. dan juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program kerja dalam peningkatan kualitas hidup perempuan di kota Batu, Dalam upaya pemberdayaan perempuan ada beberapa kegiatan salah satunya yaitu kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dimana kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan kegiatan tersebut tentunya ada juga kendala yang sering dialami salah satunya terkait dengan terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus.”

(Sumber : wawancara kepala seksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 12 Oktober 2021)

Maka dalam ini hal merupakan sebagai leading sektor program/kegiatan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan. Artinya kegiatan pengarusutamaan gender merupakan suatu upaya yang dibangun untuk mengintegasikan gender menjadi laki dan juga perempuan. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran,fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Menyatakan bahwa:

“Strategi Pengarusutamaan gender (PUG) di buat dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-hak nya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,ekonomi,sosial, budaya, pertahanan dan keaamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan juga menciptakan keadilan gender yang merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.”

Perlu di ketahui bahwa Kota Batu merupakan kota pariwisata dengan basis pertanian. Penduduk dari kota Batu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat desa yang memiliki lahan didalam kawasan kota Batu dibangun menjadi berbagai sektor seperti halnya vila,resto,wisata, toko bunga dan lain sebagainya sehingga hal tersebut dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat yang tentunya hal tersebut sebagian besar di kelola oleh perempuan, selain itu peran perempuan di Kota Batu juga berpengaruh terkait masalah pembangunan. Terlihat untuk saat ini perempuan dijadikan fokus utama dalam pengentasan kemiskinan di kota Batu seperti halnya diadakannya program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Meskipun tidak banyak dari perempuan yang mengikuti kegiatan PKK dikarenakan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan

Dengan adanya program-program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum perempuan tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari adanya kendala yang dialami. Selain dengan adanya Peran perempuan yang cukup baik ternyata masih ada banyaknya isu-isu terhadap perempuan di kota Batu. Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Batu menyatakan bahwa:

“ Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada tahun 2018-2022 adalah terkait dengan angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan juga pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat karena faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi didalam keluarga dalam hal ini pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian prespektif gender disemua bidang dan tahapan-tahapan pembangunan masih kurang.”

Hal ini mengingatkan pemberdayaan perempuan perlu adanya analisis yang lebih luas dan mendalam maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Batu Berdasarkan Perda Kota Batu No.2 tahun 2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya program pemberdayaan perempuan di kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya program pemberdayaan perempuan di kota Batu?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan upaya program pemberdayaan perempuan
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya program pemberdayaan perempuan di Kota Batu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam upaya pemberdayaan terhadap perempuan di Kota Batu
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan perempuan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dapat menjadikan evaluasi bagi bidang pemberdayaan terkait dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan yang lebih efektif
- b. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menyalurkan beberapa kritik dan saran yang membangun untuk memberikan informasi terkait dengan pemberdayaan perempuan
- c. Dengan melakukan penelitian ini peneliti dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti. tentang implementasi bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana terhadap pemberdayaan perempuan.